

ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Ruhmaini¹, Syukriy Abdullah², Darwanis³

¹Program Magister Akuntansi FEB Unsyiah, dan Pemda Aceh Tengah

^{2,3}Dosen Magister Akuntansi FEB Unsyiah Banda Aceh

Korespondensi Penulis:

¹annie.maini@gmail.com, ²syukriabdullah@unsyiah.ac.id, ³ekonomi669@gmail.com

Abstract

Local governments have an important role in optimizing local financial management to improve public services to the public. One of the most common financial management issues is the absorption of budget in District Revenue and Expenditure Budgets (APBK) at the end of budget year is often below target or lower than its budget. This will result in the loss of spending benefits because the allocated funds cannot be fully utilized, which means there is iddle money. This study aims to analyze the absorption of budget of the Aceh Tengah District Government based on the type of expenditure, function and its organization. The secondary data obtained from the Qanun of about the Responsibility and its Implementation of APBK Aceh Tengah for the years 2012-2015 . The results showed that the budget absorption based on the type of expenditure, function and organization fluctuated every year. The average budget absorption from 2012 to 2015 is based on the type of expenditure of 87.03%, the average absorption of expenditure by function of 93.32%, and the average uptake of expenditure by the organization of 94.44%.

Keywords: *budget absorpsion, expenditure type, expenditure function, organization.*

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu masalah pengelolaan keuangan yang sering ditemui adalah serapan anggaran belanja daerah pada APBK diakhir tahun anggaran seringkali berada dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi *iddle money*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, berdasarkan fungsi dan berdasarkan organisasi. Data yang dianalisis terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari qanun APBK Aceh Tengah tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.

Kata kunci: Serapan anggaran, jenis belanja, fungsi belanja, organisasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 memberikan banyak perubahan berupa terjadinya pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan juga peningkatan pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2002:63). Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Putri, 2015). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah memiliki peran peting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlaksana jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya serapan anggaran belanja daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Kegagalan target penyerapan anggaran ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi *idle money* (BPKP, 2011).

Sampai saat ini, pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk kedalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki serapan anggaran yang

rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif, 2012).

Penelitian tentang masalah serapan anggaran sudah sering dilakukan, diantaranya adalah penelitian tentang kajian analisis oleh Kementerian Keuangan (2014) yang memilih 10 daerah untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi penyerapan belanja daerah sampai dengan akhir tahun anggaran masih dibawah target. Miliasih 2012 meneliti Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja Satuan Kementerian Negara/Lembaga TA 2010. Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan pengembangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada daerah penelitian, unit analisis, dan periode waktu penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jumlah serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja, fungsi, dan organisasi di kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka mengoptimalkan serapan anggaran serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik.

Pembahasan selanjutnya adalah untuk mendiskusikan permasalahan serapan anggaran, metode penelitian yang digunakan, gambaran belanja daerah di kabupaten Aceh Tengah, dan analisis serapan anggaran belanja kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.

TINJAUAN TEORETIS

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Menurut Mayper, et al. (1991) anggaran yang disetujui adalah rencana fiskal awal pemerintah daerah. Penganggaran memainkan peranan penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002: 61). Penganggaran adalah suatu sistem yang penting di hampir semua organisasi (Ekholm dan Walin dalam Juliani 2014) dan ditujukan untuk memahami cara kerja organisasi (Henden dan Van Der Stede dalam Juliani, 2014).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode penganggaran yang bersangkutan. Defenisi dari belanja menurut PP Nomor 58 Tahun 2015 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun.

Dalam PP No.58 Tahun 2005 belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sementara

klasifikasi belanja menurut PP 71 Tahun 2010, belanja dibedakan berdasarkan jenis belanja, berdasarkan fungsi dan berdasarkan organisasi. Berdasarkan jenis belanja, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer. Sedangkan berdasarkan organisasi, belanja terdiri dari belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan fungsi belanja diklasifikasikan menjadi belanja untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Serapan Anggaran

Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Menurut Abdullah & Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah, et al. 2015).

METODE PENELITIAN

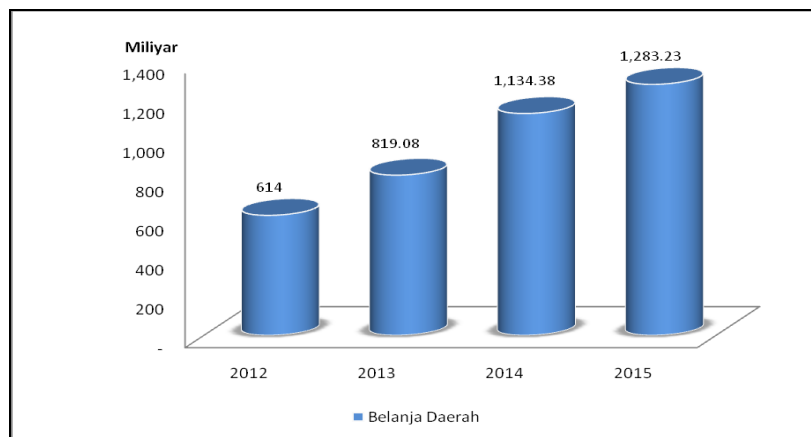
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menghitung persentase serapan anggaran belanja dan bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis serapan anggaran belanja pemerintah kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di kabupaten Aceh Tengah, kecuali Kantor Camat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang telah tersedia dalam dokumen Qanun APBK dan Laporan Pertanggungjawaban APBK Kabupaten Aceh Tengah selama empat tahun dari tahun 2012-2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

Secara Umum, jumlah belanja daerah di kabupaten Aceh Tengah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2012 jumlah total belanja pemda adalah Rp613.520.644.799,00 kemudian pada tahun anggaran 2013 meningkat sebesar 33,50% atau Rp819.079.453.981,20 pada tahun anggaran 2014 belanja pemda meningkat sebesar Rp315.297.841.030,67 atau 38,50% menjadi Rp1.134.377.295.011,87 dan pada tahun anggaran 2015 jumlah total belanja pemda meningkat lagi sebesar 13,12% atau Rp148.854.130.180,25 menjadi Rp1.283.231.425.192,12. Grafik 1 menunjukkan tentang besaran belanja daerah di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2012-2015.



Grafik 1
Besaran Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

I. Analisis Serapan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Jenis Belanja, Fungsi, dan Organisasi

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari BPKK Aceh Tengah, maka dapat dilakukan analisis untuk mengetahui persentase serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun anggaran 2012-2015 berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.

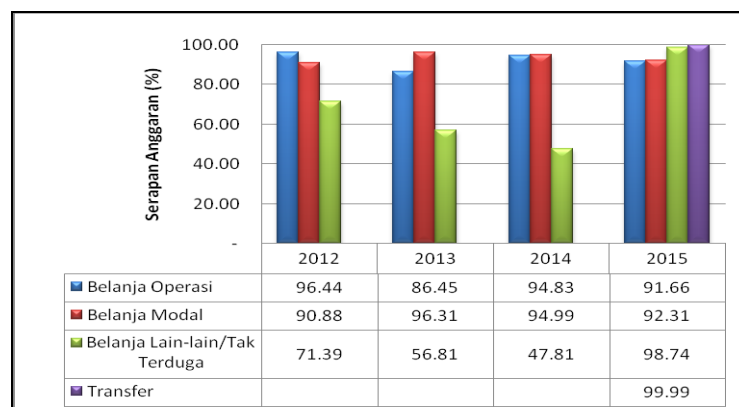
Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (2012-2015)

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja disebut juga dengan belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi. Untuk melihat besarnya serapan anggaran dari masing-masing jenis belanja yang diperoleh dari data realisasi APBK tahun anggaran 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik 2. Serapan anggaran masing-masing belanja yang dianggarkan cenderung fluktuatif, besaran serapan anggaran belanja operasi terbesar yaitu pada tahun 2012 sebesar 96,44% atau sekitar Rp518.362.729.794,95 dari

jumlah anggaran Rp537.5219.41.082,00 dan terendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 86,45% atau sekitar Rp589.885.748.250,42 dari jumlah anggaran sebesar Rp682.306.141.949,20. Jumlah rata-rata belanja operasi yang terserap dari tahun anggaran 2012-2015 adalah sebesar 92,34% atau Rp715.922.051.546,63.

Untuk belanja modal, jumlah anggaran belanja yang terserap paling besar pada tahun 2013 yaitu sebesar 96,31% atau sekitar Rp128.030.161.649,00 dari jumlah belanja sebesar Rp132.939.312.032,00 dan jumlah belanja yang terserap paling rendah pada tahun 2012, yaitu sebesar 90,88% atau sebesar Rp131.006.766.727,00 dari jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp144.152.934.585,00. Rata-rata anggaran belanja modal yang terserap selama 4 tahun dari tahun anggaran 2012-2015 adalah sebesar 93,71%.

Untuk belanja tak terduga terlihat serapan anggaran terbesarnya terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar 98,74% atau Rp140.898.576.525,5 dari jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp140.911.652.182,00, sedangkan serapan anggaran belanja tak terduga terendah adalah 47,81% yang terjadi pada tahun 2014 atau sekitar Rp446.133.455,00 dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp933.215.820,00. Jumlah serapan anggaran belanja tak terduga rata-rata selama 4 tahun dari tahun anggaran 2012-2015 adalah sebesar 67,42%. Untuk belanja transfer serapan anggarannya adalah 99,99% pada tahun 2015. Belanja transfer ini baru dianggarkan pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya jumlah belanja yang terserap dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.

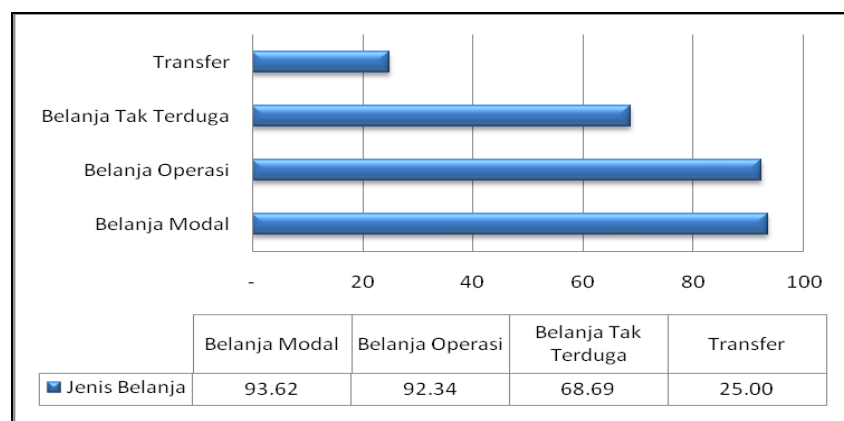


Grafik 2
Serapan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, belanja operasi adalah belanja yang memiliki jumlah alokasi dana yang paling besar dengan rata-rata setiap tahunnya dari tahun 2012-2015 adalah sebesar 77,28% dari total belanja daerah. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Besarnya jumlah belanja operasi ini juga menunjukkan kurang efisiennya belanja pemerintah daerah karena akan mengurangi jumlah belanja

modal yang berdampak pada minimnya program yang dapat dilaksanakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Setelah belanja operasi belanja modal menduduki peringkat kedua, yang selanjutnya belanja tak terduga dan belanja transfer. Berdasarkan jenis belanja, jumlah serapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih terlihat rendah. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah rata-rata serapan anggaran belanja berdasarkan jenis dari tahun 2012-2015 yang masih berada dibawah 95%. Untuk lebih jelasnya besar rata-rata serapan anggaran belanja berdasarkan jenis selama empat tahun berturut-turut dapat kita lihat pada grafik 3.



Grafik 3
Rata-Rata Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (2012-2015)

Jumlah rata-rata serapan anggaran yang paling tinggi adalah serapan anggaran belanja modal, yaitu sebesar 93,62%, sedangkan rata-rata serapan anggaran belanja operasi lebih rendah 1,28% dari dari serapan anggaran belanja operasi rata-rata yaitu sebesar 92,34%. Serapan anggaran belanja terendah adalah serapan anggaran belanja transfer. Rendahnya serapan anggaran rata-rata belanja transfer disebabkan karena belanja transfer baru dianggarkan pada tahun 2015 yang dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Fungsi (2012-2015)

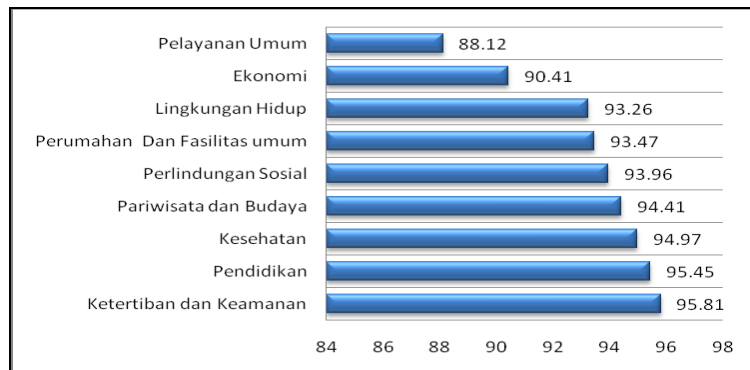
Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah serapan anggaran belanja berdasarkan fungsi belanja cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2012 serapan anggaran belanja terbesar adalah pada belanja perumahan dan Fasilitas Umum yaitu sebesar 98,82%. Sedangkan serapan belanja terendah adalah belanja untuk fungsi ekonomi yang serapan anggarannya hanya sebesar 71,09%. Rata-rata jumlah anggaran belanja yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2012 adalah 93,44%.

Jumlah serapan anggaran belanja tertinggi berdasarkan fungsi untuk tahun 2013 adalah pada fungsi belanja ekonomi yaitu sebesar 97,49%. Fungsi belanja yang serapannya paling rendah adalah belanja untuk pelayanan umum, yaitu hanya sebesar 67,89%. Rata-rata jumlah anggaran belanja yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2013 adalah 93,04%.

Serapan anggaran belanja berdasarkan fungsi untuk tahun anggaran 2014 tertinggi terdapat pada fungsi belanja ketertiban dan keamanan, yakni sebesar 97,04. Sementara untuk belanja yang serapan anggarannya yang paling rendah adalah untuk fungsi belanja lingkungan hidup, yaitu sebesar 89,09%. Rata-rata jumlah anggaran belanja yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2014 adalah 94,30%.

Jumlah serapan anggaran belanja berdasarkan fungsi yang tertinggi untuk tahun 2015 pada fungsi belanja ekonomi sebesar 97,02%. Serapan belanja terendah yaitu untuk fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum, yaitu sebesar 83,37%. Rata-rata jumlah anggaran belanja yang terserap berdasarkan fungsi belanja pada tahun 2015 adalah 92,48%.

Berdasarkan fungsinya, jumlah serapan anggaran belanja dari tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif. Jumlah serapan anggaran rata-rata setiap fungsi juga menunjukkan angka di bawah 95%. Grafik 3 menunjukkan jumlah rata-rata serapan anggaran belanja berdasarkan fungsi dalam empat tahun berturut-turut.



Grafik 4
Rata-Rata Serapan Anggaran Berdasarkan Fungsi Belanja (2012-2015)

Jumlah serapan anggaran belanja rata-rata tertinggi adalah fungsi ketertiban dan keamanan (95,81%), fungsi pendidikan (95,45%) dan fungsi kesehatan (94,97%). Fungsi ketertiban dan keamanan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan dalam mendukung ketahanan dan keamanan kondisi daerah. Sementara fungsi pendidikan ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah, maupun gedung sekolah dan fungsi kesehatan ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas

kesehatan dan pelayanannya seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan (alat medis maupun penunjang), dan gedung kesehatan.

Jumlah serapan rata-rata belanja berdasarkan fungsi yang paling rendah yaitu serapan anggaran untuk fungsi pelayanan umum (88,12%) dan fungsi ekonomi (90,41%). Fungsi pelayanan umum ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta seperti untuk pembayaran gaji, akses layanan/perijinan, kemudahan informasi, dan belanja operasi kebutuhan perkantoran sehari-hari. Sementara fungsi ekonomi digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai *multiplier effect* yang besar.

Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Organisasi (2012-2015)

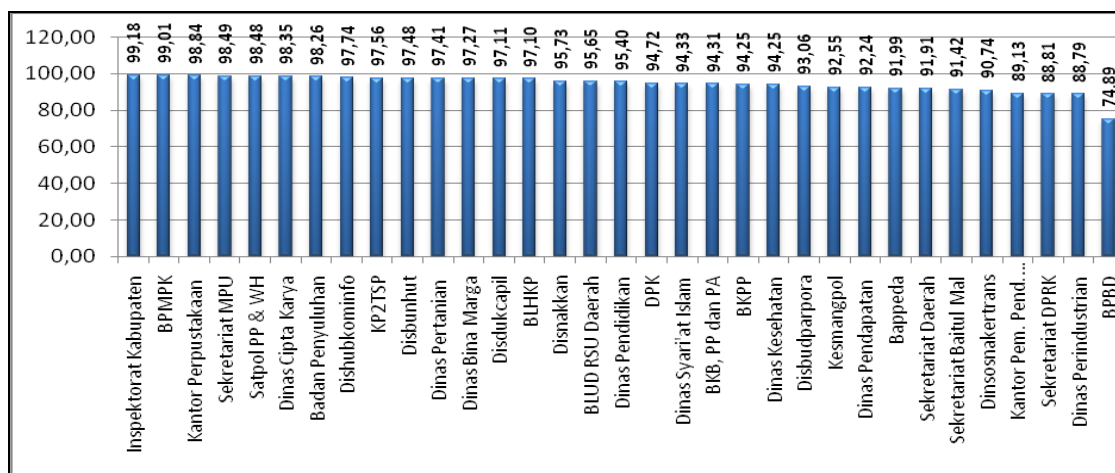
Dari data Realisasi APBK dari tahun 2012-2015 dapat kita lihat data besarnya serapan anggaran dari masing-masing SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Serapan anggaran belanja tertinggi untuk tahun 2012 adalah pada Inspektorat Kabupaten yaitu sebesar 99,11%, sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu pada SKPK Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu hanya 64,85%. Rata-rata serapan anggaran belanja SKPK pada tahun 2012 adalah sebesar 94,83%.

Pada tahun 2013 SKPK dengan serapan anggaran tertinggi ada pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu sebesar 99,44%. Sementara SKPK dengan serapan anggaran yang terendah adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar 89,38%. Rata-rata serapan anggaran belanja SKPK pada tahun 2013 adalah sebesar 96,17%.

Pada tahun 2014 jumlah serapan anggaran tertinggi ada pada Inspektorat Kabupaten yaitu sebesar 99,46% terendah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni sebesar 76,37%. Persentase rata-rata serapan anggaran belanja SKPK pada tahun 2014 adalah 94,34%. Dan pada tahun 2015 serapan anggaran belanja SKPK tertinggi ada pada Dinas Bina Marga yaitu sebesar 99,56%, terendah adalah sebesar 13,29% pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rendahnya serapan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disebabkan karena adanya dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditransfer dari pusat pada akhir tahun anggaran 2015, sehingga dana belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Serapan anggaran belanja SKPK rata-rata pada tahun 2015 adalah 92,82%.

Berdasarkan organisasi, rata-rata besar serapan anggarannya dapat dilihat pada Grafik 5. SKPK yang serapan anggarannya paling tinggi selama empat tahun dari tahun 2012-2015 adalah Inspektorat Kabupaten dengan rata-rata 99,18%. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling

rendah (berada di bawah 90%) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (74,89%) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (88,79%) serta Sekretariat DPRK (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (89,13%). Rendahnya serapan anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebabkan karena pada akhir tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima dana transfer untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam/gempa gayo sebesar Rp51.489.683.000,00 sehingga dana tidak dapat direalisasikan. Untuk SKPK lainnya yang rendah serapan anggarannya dapat disebabkan karena adanya permasalahan-permasalahan dalam proses pengelolaan dan masih perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Dari Grafik 5 hanya ada dua SKPK di Aceh Tengah yang serapan anggarannya mencapai 99% lebih.



Grafik 5
Serapan Anggaran Rata-Rata Berdasarkan Organisasi (2012-2015)

Terkait dengan adanya sisa anggaran (rendahnya serapan anggaran) pada pemerintah daerah setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat disini, diantaranya (Abdullah, 2013):

1. Proses penganggaran di eksekutif mengandung peluang terjadinya *budget slack*, baik berupa *mark-down* (untuk target pendapatan asli daerah atau PAD) maupun *mark-up* (untuk target belanja);
2. Tidak selalu tersedia informasi yang lengkap tentang berapa sebenarnya sisa anggaran yang riil atau dipastikan terjadi menjelang akhir tahun karena masih ada kesempatan untuk mempertanggungjawabkan program/kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD; dan
3. Adanya keinginan untuk membuat cadangan (*reserves*) dalam bentuk SILPA yang akan “digunakan” pada perubahan anggaran tahun berikutnya. Pada tahun anggaran berikutnya, SILPA berubah bentuk menjadi SiLPA sebagai komponen dari penerimaan pembiayaan dalam APBD. Oleh karena besaran SiLPA ditentukan ketika jumlah riilnya belum diketahui, maka

setelah LKPD tahun sebelumnya diaudit oleh BPK RI. Hampir dipastikan akan terjadi selisih antara SILPA dalam Perda APBD dengan SILPA sebelumnya yang riil.

Dalam peningkatan proses pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan regulasi berupa qanun tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah maupun Standar belanja barang dan standar biaya yang diperlukan dalam proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBK. Namun masih saja terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan terutama dalam aspek politik anggaran dan perilaku *moral hazard* lainnya. pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus bekerja lebih giat lagi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, terutama untuk SKPK. Selain masalah tidak tercapainya target belanja, serapan anggaran juga mengikuti pola rendah diawal dan naik secara drastis diakhir tahun anggaran. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan harus diutamakan untuk para perencana dan pelaksana kegiatan di SKPK. Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pendapatan yang dibentuk juga harus dapat bekerja optimal dan mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan penyerapan belanja.

KESIMPULAN & SARAN

1. Serapan anggaran belanja rata-rata pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama empat tahun pengamatan (2012-2015) masih menunjukkan angka dibawah 95% dan masih berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran belanja tertinggi adalah serapan anggaran berdasarkan organisasi yaitu sebesar 94,44%, selanjutnya serapan anggaran berdasarkan fungsi belanja sebesar jenis belanja 93,32% dan terakhir serapan belanja berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%.
2. Untuk serapan anggaran belanja berdasarkan organisasi, rata-rata serapan anggaran sudah cukup baik. SKPK yang memiliki serapan anggaran paling tinggi adalah Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung yaitu berada di atas 99%. Terdapat beberapa SKPK yang rata-rata serapan anggarannya masih berada di bawah 90%, yaitu Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan dayah 89,13%, Sekretariat DPRK 88,81%, Dinas Perindustrian 88,79% dan paling rendah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 74,89%.
3. Untuk analisis serapan anggaran pada penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang bagaimana serapan anggaran belanja di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi. Sehingga permasalahan dalam proses serapan anggaran belanja yang rendah belum

teridentifikasi dalam penelitian ini, begitu juga dengan pengaruh dari masing-masing jenis belanja terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Aceh Tengah.

4. Dari temuan penelitian ini, maka pengambil keputusan diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah strategis yang terkait dengan proses penetapan dan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya perlu juga dilakukan penelitian lanjutan tentang Analisis serapan anggaran belanja berdasarkan jenis, fungsi dan organisasi untuk mengupas permasalahan yang dihadapi daerah dan tentang bagaimana dampak dari serapan belanja ini terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2013. Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja, Laman sumber:
<https://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/Oktober>.
- Abdullah, S. & Ramadhaniatun Nazry. 2014. *Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar*. Laman sumber:
http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/varian-anggaran-pendapatan-daerah/?relatedposts_exclude=2784. Diakses pada 9 Oktober 2016.
- _____. & Romaidon Darma & Hasan Basri. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). *Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) ke-2, IAI KAPD Jakarta-Banten, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, 25-26 Februari*.
- Arif, Emkhad. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Tesis* (tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM,.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2011 *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review Tahun III No. 6. Desember 2011.
- Juliani, Dian & Mahfud Sholihin. 2014. Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia* 11(2): 177-199.
- Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
- _____. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.
- _____. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013.
- _____. Qanun Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013.

- _____. Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014.
- _____. Qanun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014.
- _____. Qanun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.
- _____. Qanun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan pelaksanaan spending performance dalam mendanai pelayanan publik*. Laman Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ebook/39-laporan-pelaksanaan-spending-performance-dalam-mendanai-pelayanan-publik/4-publikasi-Januari>.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayper, Alan.G., Michael Granof & Gary Giroux. 1992. An Analysis of Municipal Budget Variances. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 4(1): 29-50.
- Putri, C. T. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah provinsi Bengkulu, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*, diterjemahkan oleh Kwan Men on (New York: John Wiley & Sons Inc).